



ANALISIS BIBLIOMETRIK TREN PENELITIAN KETERTIBAN UMUM DI INDONESIA

Maniso Mustar¹, Annisa Rahmadanita²

¹ Universitas Gadjah Mada

² Institut Pemerintahan Dalam Negeri

Corresponding author: ariemaniso1205@ugm.ac.id

Received: 17-12-2025, Accepted: 29-12-2025; Published Online: 31-12-2025

ABSTRAK

Penelitian terkait ketertiban umum di Indonesia cukup banyak dilakukan, dan sebagain besarnya merupakan penelitian secara praktis. Sedangkan, masih minim penelitian yang mengkaji perkembangan penelitian tersebut. Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis tren penelitian ketertiban umum di Indonesia. Metode yang digunakan adalah analisis bibliometrik menggunakan database akademik Scopus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa publikasi dengan topik ketertiban umum di Indonesia paling banyak dilakukan pada tahun 2019 s.d. 2023. Analisis *co-occurrence* menunjukkan bahwa penelitian ketertiban umum bersifat multidisipliner dengan tema hukum, kebijakan, sosial, dan tata kelola, sementara publikasi terbaru mengarah pada isu keadilan pidana dan sosial ekonomi, sehingga penelitian masa depan berpeluang difokuskan pada implementasi kebijakan daerah, tata kelola kolaboratif, dan dampaknya terhadap pembangunan perkotaan. Kesimpulannya, tren penelitian ketertiban umum di Indonesia bergeser menuju pendekatan multidisipliner yang berfokus pada implementasi kebijakan dan tata kelola kolaboratif.

Kata Kunci: Analisis Bibliometrik; Ketertiban Umum; Ketenteraman dan Ketertiban Umum.

Copyright (c) 2025 Maniso Mustar, Annisa Rahmadanita



This work is licensed under the Creative Commons Attribution-Non Commercial-ShareAlike 4.0 International License.

ABSTRACT

A considerable amount of general research has been conducted in Indonesia, most of which is practical. However, there is still a lack of research examining the development of this research. The purpose of this study is to analyze general research trends in Indonesia. The method used is bibliometric analysis using the academic database Scopus. The results indicate that publications on general topics in Indonesia were most frequent between 2019 and 2023. Co-occurrence analysis indicates that the research is multidisciplinary, with themes ranging from law, policy, social issues, and governance. While recent publications focus on criminal justice and socioeconomic issues, future research should focus on regional policy implementation, collaborative governance, and their impact on urban development. In conclusion, general research trends in Indonesia are shifting toward a multidisciplinary approach focused on policy implementation and collaborative governance.

Keywords: *Bibliometric Analysis; Public Order; Public Order and Peace.*

PENDAHULUAN

Ketertiban umum merupakan salah satu fungsi fundamental negara yang berperan dalam menjaga stabilitas sosial, menjamin hak-hak warga negara, serta mendukung terselenggaranya kehidupan bermasyarakat yang aman dan berkeadilan. Pembangunan institusional ketertiban umum menekankan pentingnya kebijakan dan pembagian kewenangan yang jelas, adaptif, dan terkoordinasi, dengan penegakan hukum oleh kepolisian sebagai instrumen utama negara dalam menjaga ketenteraman masyarakat (Anggoro, 2023). Penyelenggaraan ketertiban umum di Indonesia didukung oleh berbagai kebijakan. Diantaranya adalah melalui amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, sebagai landasan bagi pembentukan Satuan Polisi Pamong Praja untuk menegakkan peraturan daerah dan menyelenggarakan ketertiban umum. Berikutnya, melalui Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 yang mengatur

secara spesifik tentang Satuan Polisi Pamong Praja. Kemudian, Permendagri Nomor 26 Tahun 2020 pun mengatur tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat serta Perlindungan Masyarakat.

Penyelenggaraan ketertiban umum di Indonesia masih menghadapi berbagai tantangan, terutama yang berasal dari kesenjangan sosial ekonomi dan kesenjangan penerapannya dalam peraturan daerah. Sebagaimana penelitian Idza (2023) yang menyatakan bahwa potensi gangguan ketertiban umum dapat menimbulkan risiko stigmatisasi sosial. Lebih lanjut, Fitri (2019) menyebutkan bahwa terdapat beberapa tantangan dalam penerapannya, meliputi rendahnya kesadaran hukum masyarakat terbatasnya sumber daya manusia untuk penegakan hukum, sosialisasi peraturan yang belum meluas, dan kurangnya sanksi yang bisa menimbulkan efek jera. Senada dengan hal tersebut, Karyoto & Pratama (2024)

pun menjelaskan bahwa setidaknya terdapat lima tantangan yang umumnya dihadapi, yaitu berkaitan dengan pedoman teknis pelaksanaan ketertiban umum, kompetensi perangkat daerah, sarana prasarana, alokasi anggaran, dan komitmen pemerintah daerah dalam penegakan sanksi. Tantangan lainnya baik secara internal maupun eksternal pun masih diharapi, seperti tantangan sumber daya manusia yang terbatas, masyarakat yang belum patuh, hingga tekanan ekonomi (PA et al., 2023).

Berbagai penelitian yang mengkaji ketertiban umum di Indonesia cukup banyak. Sebagaimana Rahmadanita (2019) yang menjelaskan tentang pembinaan ketertiban umum secara spesifik pada gelandangan dan pengemis dapat dilakukan melalui upaya peningkatan koordinasi dan kerjasama pemerintah daerah baik secara internal dan eksternal. Di sisi lain, Butarbutar & Yusuf (2025) mengkaji penertiban PKL berdampak pada hilangnya mata pencaharian dan konflik sosial karena pelaksanaannya belum disertai pendekatan yang humanis dan solusi yang berkeadilan. Sejalan dengan itu, disebutkan oleh Kristianto & Farhana (2024), bahwa adanya komitmen, koordinasi, dan kompetensi petugas menjadi faktor pendukung dalam pelaksanaan ketertiban umum. Penelitian

yang ditulis oleh Suprayetno (2017) menyimpulkan bahwa ketidakjelasan definisi ketertiban umum dalam peraturan perundang-undangan menyebabkan tumpang tindih kewenangan penegakan hukum antara Satpol PP dan Polri. Affrian et al. (2024) menyebutkan bahwa dibutuhkan koordinasi dan pembinaan bersama dalam rangka mewujudkan ketertiban umum di masyarakat. Aspek kerjasama antar Lembaga pun disinggung oleh Rachmahwati et al. (2024), agar penerapan ketertiban umum dapat terselenggara secara efektif.

Berdasarkan uraian tersebut, dapat dipahami bahwa Sebagian besar penelitian terkait ketertiban umum di Indonesia merupakan kajian implementatif. Sementara itu, perbedaannya dengan penelitian ini terletak pada metode analisis yang digunakan, bahwa penelitian ini secara spesifik menggunakan analisis bibliometrik. Adapun penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tren penelitian ketertiban umum di Indonesia.

KAJIAN TEORI

Keamanan, ketenteraman, dan ketertiban merupakan prasyarat utama bagi terwujudnya kesejahteraan masyarakat (Ilham & Rahman, 2023). Ketertiban disebut sebagai suatu keadaan yang teratur, untuk mendorong terciptanya suasana yang damai dan tenteram (Labolo,

2016). Eviany & Sutiyo (2023) menyatakan bahwa ketenteraman berkaitan dengan kondisi psikologis masyarakat, sedangkan ketertiban umum mencerminkan keteraturan dan kepatuhan terhadap norma dan hukum. Sementara itu, Suradinata (2013) menegaskan bahwa ketenteraman dan ketertiban bertujuan menciptakan kondisi aman dan teratur yang mendukung aktivitas pemerintah dan masyarakat. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa ketertiban umum merupakan kondisi keteraturan sosial yang tercipta melalui kepatuhan terhadap hukum dan norma yang berlaku, guna menjamin stabilitas, keamanan, dan kelancaran aktivitas masyarakat serta penyelenggaraan pemerintahan.

METODE

Penelitian ini menggunakan analisis bibliometrik. Analisis bibliometrik adalah metode kuantitatif untuk mengidentifikasi tren penelitian dan struktur jaringan keilmuan melalui analisis sistematis terhadap publikasi ilmiah dalam jumlah besar (Donthu et al., 2021). Bibliometrik adalah metode penelitian untuk mengkaji perkembangan dan evolusi keilmuan pada berbagai disiplin ilmu melalui analisis publikasi ilmiah (Verma & Gustafsson, 2020). Penelitian bibliometrik ini bertujuan untuk menggambarkan

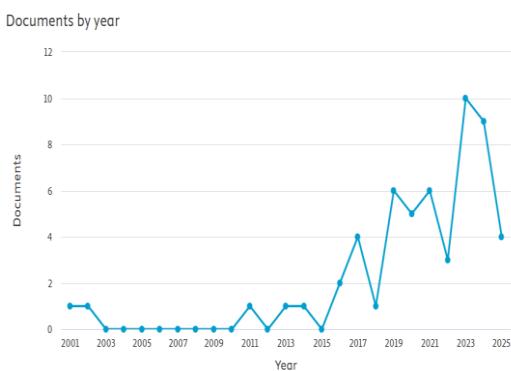
perkembangan publikasi akademik dari topik ketertiban umum di Indonesia.

Database akademik yang digunakan adalah Scopus. Peneliti menetapkan kata kunci yaitu “Public Order” AND “Indonesia”, dan memperoleh hasil penelusuran sejumlah 55 dokumen publikasi. Tahun publikasi artikel adalah sejak awal publikasi tahun 2001 hingga artikel yang dipublikasikan pada tahun 2025. Jenis dokumen yang digunakan adalah artikel jurnal. Selanjutnya, keseluruhan dokumen tersebut diunduh dan disimpan menggunakan csv/ris. Adapun penelitian ini memanfaatkan software Vos Viewer dalam analisis data.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Tren Publikasi

Hasil penelitian menunjukkan bahwa publikasi internasional terkait ketertiban umum di Indonesia belum terlalu banyak diminati. Sebagaimana perkembangan penelitian dari tahun ke tahun yang tidak mengalami peningkatan signifikan. Lebih lanjut dapat dilihat pada gambar 1.



Sumber: Scopus, 2025

Gambar 1.
Perkembangan Publikasi Ketertiban Umum di Indonesia tahun 2001 s.d. 2025

Gambar 1. menunjukkan bahwa publikasi ilmiah dengan topik ketertiban umum di Indonesia menunjukkan dinamika yang fluktuatif namun denderung meningkat dalam jangka panjang. Pada periode awal yaitu pada tahun terbit 2001 s.d. 2010, jumlah publikasi relative sangat terbatas, yang mengindikasikan bahwa isu ketertiban umum belum menjadi fokus utama kajian akademik atau masih diperlakukan sebagai bagian kecil dari studi pemerintahan dan kebijakan publik.

Selanjutnya, pada periode tahun terbit 2011 s.d. 2015, mulai terlihat kemunculan publikasi meskipun dalam jumlah yang masih rendah dan tidak konsisten, yang dapat mencerminkan adanya fase awal peningkatan perhatian akademik terhadap isu tersebut.

Adapun peningkatan lebih signifikan terjadi pada tahun 2016, yang ditandai dengan lonjakan jumlah dokumen yang semakin jelas hingga mencapai puncak publikasi pada periode tahun terbit 2019 s.d. 2023. Tren penelitian tersebut menggambarkan bahwa meningkatnya relevansi isu ketertiban umum di Indonesia seiring dengan dinamika urbanisasi, penguatan peran pemerintah daerah, dan meningkatnya perhatian terhadap aspek keamanan, ketertiban, fungsi pelayanan publik, dalam pelaksanaan tata kelola perkotaan di Indonesia. Adapun puncak publikasi terjadi pada tahun 2023, yaitu dengan sejumlah sepuluh dokumen publikasi.

Tabel 1.
Tren Publikasi berdasarkan Media Publikasi

No	Nama Media Publikasi	Rangking Index	Jumlah Publikasi
1	Sriwijaya Law Review	Q2	3
2	Asian Journal of Comparative Law	Q3	2
3	International Journal Criminal Justice Sciences	Q3	2
4	Journal of Infrastructure Policy and Development	Q2	2
5	Journal of Law and Sustainable Development	Q2	2
6	Legality Jurnal Ilmiah Hukum	Q1	2
7	Academic Journal of Interdisciplinary Studies	Q3	1

8	Academy Strategic Management Journal	Q3	1
9	African Journal of Science Technology Innovation and Development	Q3	1

Sumber: Scopus 2025, diolah peneliti

Berdasarkan distribusi media publikasi pada tabel tersebut, artikel tentang ketertiban umum di Indonesia dipublikasikan pada jurnal dengan kualitas indeks yang relative baik, dan sebagian besar dipublikasi melalui jurnal bereputasi Q1 hingga Q3. Media publikasi Sriwijaya Law Review menempati urutan terbanyak yang mempublikasikannya. Hal tersebut mengindikasikan bahwa terdapat peran dari jurnal hukum bereputasi yang mengkaji isu ketertiban umum dari perspektif hukum dan kebijakan. Di sisi lain, kehadiran jurnal bereputasi Q1 seperti Legality Jurnal Ilmiah Hukum dan

Al Adalah menegaskan bahwa topik ini memiliki relevansi ilmiah tinggi dan berkontribusi pada diskursus akademik yang mapan, khususnya dalam kajian hukum, tata kelola, dan pembangunan berkelanjutan.

2. Sitasi Artikel

Peneliti menganalisis perkembangan penelitian ketertiban umum di Indonesia berdasarkan jumlah sitasi terbanyak. Lebih lanjut dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.
Sepuluh Artikel dengan Sitasi Terbanyak

No.	Judul Artikel	Media Publikasi	Jumlah Sitasi
1	Public islam and the problem of democratization	Sociology of Religion A Quarterly Review	90
2	'Vagrants wearing make-up': Negotiating spaces on the streets of Yogyakarta, Indonesia	Urban Studies	84
3	Mixed-methods evaluation of a ban on tobacco advertising and promotion in Banyuwangi District, Indonesia	Tobacco Control	28
4	Limitations to Freedom of Religion or Belief in Indonesia: Norms and Practices	Religion and Human Rights	18
5	A Restorative Justice System in Indonesia: A Close View from the Indigenous Peoples' Practices	Sriwijaya Law Review	17
6	Blasphemy and judicial legitimacy in Indonesia	Politics and Religion	16
7	The Indonesian constitutional court: Reconfiguring decentralization for better or worse?	Asian Journal of Comparative Law	15
8	The implementation of sharia bylaws and its negative social outcome for Indonesian women	Indonesian Journal of Islam and Muslim Societies	14

9	A case study of transformational leadership and para-police performance in Indonesia	Policing	13
10	Arrangement Registration Of Geographical Indications Of Traditional Alcoholic Beverages In Indonesia Based Multiculturalism	Revista De Gestao Social E Ambiental	12

Sumber, Scopus 205, diolah penulis

Tabel tersebut menunjukkan bahwa kajian ketertiban umum di Indonesia banyak dipengaruhi oleh tema-tema normatif dan sosial yang bersinggungan dengan agama, ruang publik, serta tata kelola pemerintahan. Artikel pertama dengan sitasi tertinggi menegaskan bahwa prinsip ketertiban umum dalam masyarakat Muslim banyak berakar pada ajaran agama, namun tafsir politik Islam bersifat beragam dan dinamis. Dalam konteks Indonesia, perbedaan tersebut memunculkan ketegangan berkelanjutan antara tradisi Islam yang demokratis dan pluralis dengan gagasan negara Islam yang cenderung anti-pluralisme (Hefner, 2001). Isu ketertiban umum dan agama pun dikaji oleh artikel pada urutan keempat, telah di sitasi sejumlah 18 kali. Kebebasan beragama atau berkeyakinan di Indonesia dipengaruhi oleh perpaduan antara demokratisasi berbasis HAM dan tata kelola agama yang menekankan ketertiban umum serta nilai-nilai agama sebagai dasar pembatasan (Bagir et al., 2020).

Berikutnya, artikel yang memperoleh urutan kedua, menjelaskan bahwa anak perempuan yang hidup di jalanan sering mengalami perlakuan tidak

adil karena dianggap melanggar norma masyarakat yang memandang jalanan bukan tempat bagi perempuan. Namun demikian, perempuan bukan hanya korban, melainkan mampu bertahan dan menyesuaikan diri dengan menciptakan cara hidup, ruang, dan identitas sendiri sebagai bentuk perlawanan terhadap pandangan sosial yang diskriminatif (Beazley, 2002).

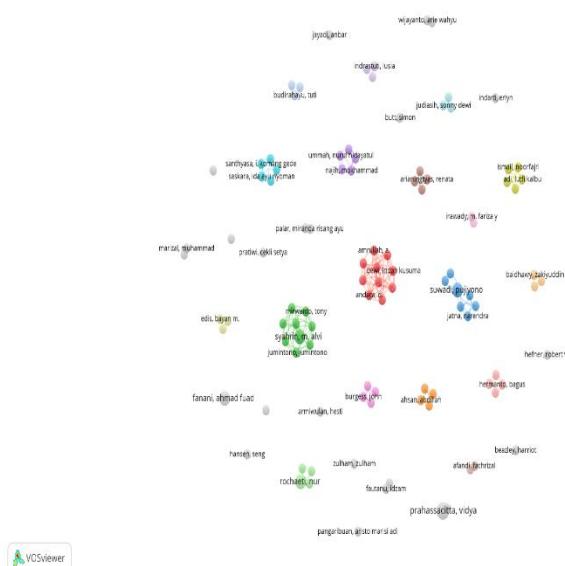
Di sisi lain, ketertiban umum pun memiliki relevansi dengan peradilan pidana adat. Sebagaimana artikel yang ditulis oleh Rochaetia et al. (2023) yang menjelaskan bahwa sistem peradilan pidana adat di Indonesia merepresentasikan bentuk keadilan restoratif yang menekankan partisipasi masyarakat dalam pencegahan kejahatan dan penyelesaian konflik melalui mekanisme hukum adat. Selanjutnya telah disitasi sejumlah 13 kali, publikasi yang dilakukan oleh Indrayanto et al. (2014) yang menyatakan bahwa kepemimpinan transformasional meningkatkan kinerja organisasi parakapolisian secara tidak langsung melalui mediasi kepercayaan dan komitmen, sehingga efektif dalam mendukung

pemeliharaan ketertiban umum yang selaras dengan norma sosial dan hak asasi manusia di Indonesia.

Berdasarkan artikel dengan sitasi tertinggi sebagaimana yang disajikan pada tabel tersebut, diketahui bahwa penelitian ketertiban umum di Indonesia masih didominasi oleh perspektif normatif yang menekankan isu agama, hukum, dan moral publik, sehingga membuka peluang pengembangan kajian yang lebih empiris dan kontekstual pada tingkat implementasi kebijakan. Penelitian masa depan perlu memperluas pendekatan metodologis melalui studi komparatif antar daerah, mixed methods, serta evaluasi kebijakan untuk menilai dampak ketertiban umum terhadap kelompok rentan dan kualitas tata kelola publik. Selain itu, integrasi isu ketertiban umum dengan agenda kontemporer seperti digital governance, keadilan restoratif, dan smart city berpotensi memperkaya kontribusi teoretis dan praktis dalam kajian kebijakan publik di Indonesia

3. Co-authorship

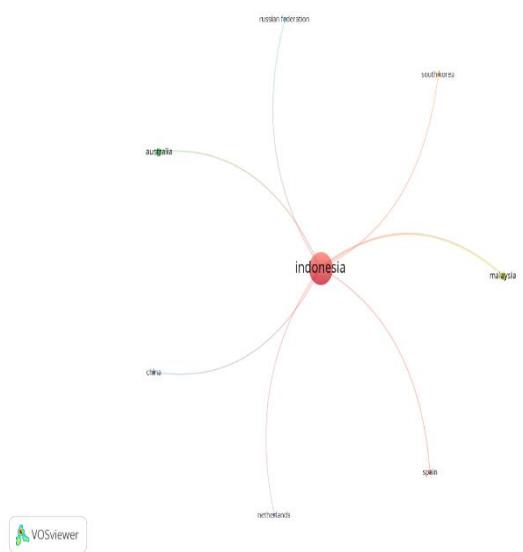
Pola kolaborasi penulis dianalisis menggunakan VOSviewer untuk memvisualisasikan jaringan co-authorship dalam publikasi ilmiah (Zupic & Čater, 2014). Penelitian ini menganalisis co-authorship berdasarkan unit analisis authors dan asal negara penulis. Lebih lanjut dapat dilihat di bawah ini.



sumber: Vos Viewer, diolah penulis 2025

Gambar 2. Tampilan Co-Authorship Unit Analisis Penulis

Gambar 2. menunjukkan jejaring kolaborasi penulis yang dianalisis berdasarkan keterkaitan antarpenulis dengan minimal satu publikasi bersama. Analisis membentuk sejumlah 37 klaster. Klaster tersebut menunjukkan bahwa sebanyak 37 artikel dihasilkan melalui kontribusi satu atau lebih penulis yang terorganisasi ke dalam sejumlah kelompok kolaboratif, yang merefleksikan pola jejaring penulisan dalam bidang ketertiban umum di Indonesia.



Sumber: Vos Viewer, diolah penulis, 2025

Gambar 3.
Visualisasi Co-authorship Berdasarkan Negara Asal Penulis

Gambar 3. menunjukkan bahwa publikasi negara asal penulis adalah dari Indonesia. Semua penulis dari negara lain pun terhubung dengan penulis dari Indonesia. Lebih lanjut, dapat dilihat pada tabel 3.

Tabel 3.
Negara Asal Penulis dan Keterkaitannya dengan Total Jaringan

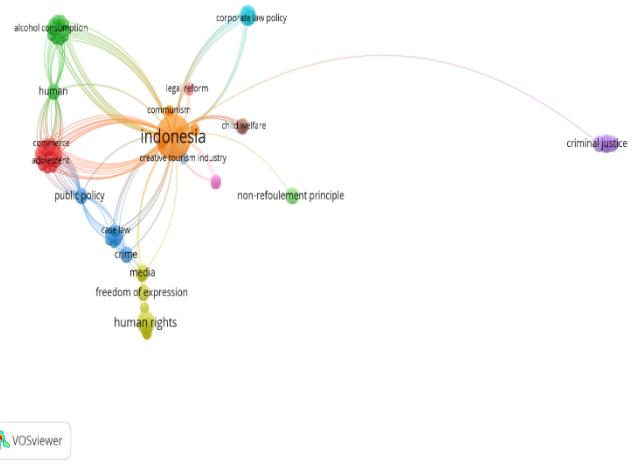
No.	Negara	Dokumen	Total Jaringan
1	Indonesia	47	9
2	Malaysia	3	3
3	Australia	3	1
4	China	1	1
5	Netherlands	1	1
6	Russian Federation	1	1
7	South Korea	1	1
8	Spain	1	1
9	Canada	1	0
10	India	1	0
11	United Kingdom	2	0
12	United States	1	0

Sumber: Scopus, diolah Penulis, 2025

Tabel tersebut menunjukkan bahwa penulis yang berasal dari negara Indonesia, paling banyak mendominasi, yaitu telah mempublikasikan sebanyak 47 dokumen, dengan total jaringan sejumlah 9. Sementara itu, penulis dari negara Canada, India, United Kingdom, dan United States, termasuk ke dalam negara yang paling sedikit mempublikasikan topik ketertiban umum di Indonesia.

4. *Co-occurrence*

Dalam penelitian ini, analisis *co-occurrence* dilakukan dengan menggunakan kata kunci yang ditetapkan oleh penulis, dengan kriteria bahwa setiap kata kunci yang dianalisis setidaknya muncul satu kali dalam artikel yang dipublikasikan.

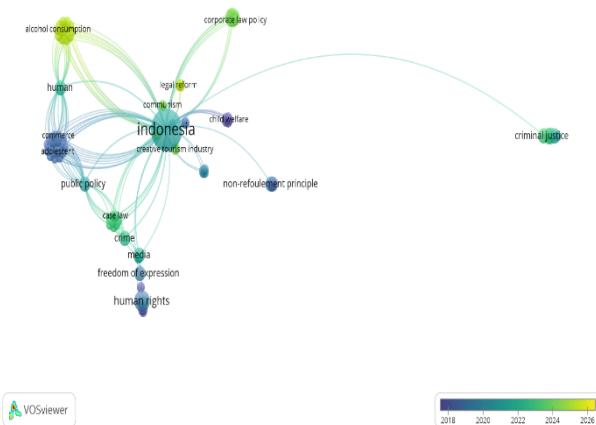


Sumber: Vos Viewer, diolah Penulis, 2025

Gambar 4.
Visualisasi Network Publikasi Ketertiban Umum di Indonesia

Gambar tersebut menunjukkan visualisasi network berdasarkan kata kunci penulis. Terdapat 98 items yang terbagi ke dalam 12 klaster. Klaster pertama terdiri dari 18 items, yaitu *adolescent, advertising, advertising and promotion, awareness, commerce, commercial phenomena, female, government employee, human experiment, humans, interview, legislation and jurisprudence low/middle income country, male, middle income country, mobile application, mobile applicationsm observational study*. Klaster dua terdiri dari 16 items, yaitu *alcohol consumption, alcohol monitoring, alcoholic beverages, attitude, beverage, distillation, education, government, human, implementation science, mental attitudes, monitoring qualitative research, societal concerns, supervision actors, the policy implementation*. Klaster tiga terdiri dari 11 items, yaitu *case law, construction projects, crime, land disputes, land law, land mafia, land policies, land rights, modus operandi, public policy, urban planning*. Klaster empat terdiri dari 10 items, meliputi *constitution, covid-19 pandemic, culture, death penalty, freedom of expression, human rights, media, religious sects, restriction, state protection*. Klaster lima terdiri dari 9 items, meliputi *authoritarian state, crime control, criminal justice, due process, law enforcement, police, public order, rule of law, security*.

Klaster enam terdiri dari 8 items, yaitu *corporate law policy, criminology and law, gender and the law, law and society, mining industry mining sector, sustainable development*. Klaster tujuh terdiri dari 8 items, meliputi *communism, criminalization, cultural equality, Indonesia, intellectual property right international investement, investor-state dispute, social reconstruction*. Klaster delapan terdiri dari 5 items, yaitu *child welfare, gender relations, public space, social exclusion, urban society*. Klaster Sembilan terdiri dari 4 items, yaitu *constitutional court, definition of relogion, freedom of religion, relogion values*. Klaster sepuluh terdiri dari 3 items, yaitu *legal reform, rights to decent work, rights to education for children*. Klaster sebelas terdiri dari 3 items, yaitu *non-refoulement principle, ratification, refugees*. Klaster dua belas terdiri dari 2 items, yaitu *creative tourism industry, dan environmental law enforcement*. Analisis visualisasi network *co-occurrence* kata kunci penulis menunjukkan bahwa struktur pengetahuan dalam korpus publikasi bersifat multidisipliner dan terfragmentasi ke dalam tema-tema hukum, kebijakan publik, sosial, serta tata kelola.



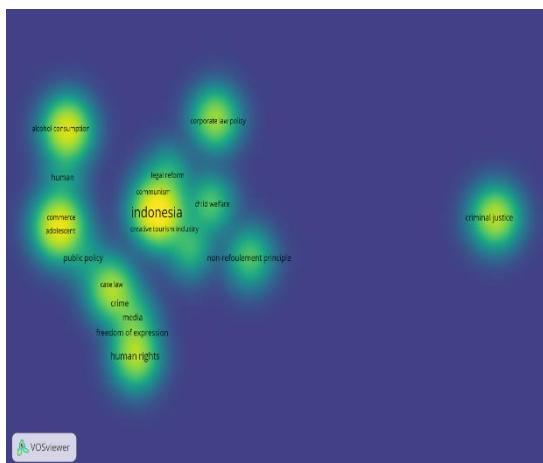
Sumber: Vos Viewer, diolah Penulis, 2025

Gambar 5.
Visualisasi Overlay Publikasi
Ketertiban Umum di Indonesia

Gambar tersebut menunjukkan adanya kata kunci “Indonesia” menjadi kata kunci terbanyak yang digunakan di dalam penelitian, dan kata tersebut menjadi simpul sentral yang menghubungkan berbagai topik. Pada fase awal publikasi (ditunjukkan oleh warna biru–ungu, sekitar 2018–2020), berfokus pada isu normatif seperti hak asasi manusia, kebebasan berekspresi, dan prinsip hukum internasional. Pada periode menengah (sekitar 2020–2022), perhatian bergeser ke arah kebijakan publik, hukum pidana, serta perlindungan kelompok rentan, yang menandakan penguatan pendekatan institusional dan kebijakan. Publikasi terbaru (warna hijau–kuning, sekitar 2023–2026) memperlihatkan perluasan kajian ke isu criminal justice, konsumsi alkohol, sektor ekonomi, dan

pariwisata, mencerminkan respons penelitian terhadap tantangan sosial-ekonomi dan pembangunan kontemporer. Penelitian ini melengkapi hasil penelitian sebelumnya yang menyatakan bahwa secara bibliometrik terdapat topik yang dapat dikembangkan yaitu Russian Federation, citizen, constitution, individual, dan human rights, yang memiliki potensi besar untuk dikembangkan dalam penelitian selanjutnya (Rahmadanita, 2023).

Adanya pergeseran issu tersebut membuka peluang penelitian masa depan untuk mengintegrasikan pendekatan normatif, kebijakan, dan empiris dalam memahami ketertiban umum di Indonesia secara lebih komprehensif. Penelitian ke depan berpotensi menekankan analisis implementasi kebijakan di tingkat daerah, tata kelola kolaboratif antar aktor kolaborasi, serta dampak ketertiban umum terhadap pembangunan ekonomi dan perkotaan. Selain itu, masih terbuka ruang kajian mengenai pemanfaatan teknologi digital dan pendekatan mixed methods guna meningkatkan efektivitas, legitimasi, dan keberlanjutan pelaksanaan ketertiban umum di Indonesia.



Sumber: Vos Viewer, diolah penulis, 2025
Gambar 6.

Visualisasi Density Publikasi Ketertiban Umum di Indonesia

Visualisasi density menunjukkan bahwa kata kunci “Indonesia” memiliki intensitas tertinggi dan berfungsi sebagai pusat konsentrasi tema penelitian, yang dikelilingi oleh isu kebijakan publik, hukum, dan sosial. Area dengan kepadatan tinggi (warna kuning–hijau terang) mengindikasikan dominasi topik hak asasi manusia, kebebasan berekspresi, kejahatan, kebijakan publik, serta konsumsi alkohol, yang menegaskan bahwa kajian ketertiban umum di Indonesia kuat pada perspektif normatif, regulatif, dan pengendalian sosial. Sebaliknya, topik seperti criminal justice tampak terpisah secara spasial dengan kepadatan tinggi namun koneksi rendah, yang menunjukkan potensi fragmentasi kajian dan sekaligus peluang integrasi riset antara penegakan hukum pidana dan diskursus ketertiban umum yang lebih luas.

PENUTUP

Tren penelitian ketertiban umum di Indonesia mengalami peningkatan lebih signifikan pada tahun 2016, yang ditandai dengan lonjakan jumlah dokumen yang semakin jelas hingga mencapai puncak publikasi pada periode tahun terbit 2019 s.d. 2023. Berdasarkan distribusi media publikasi pada tabel tersebut, artikel tentang ketertiban umum di Indonesia dipublikasikan pada jurnal dengan kualitas indeks yang relative baik, dan sebagian besar dipublikasi melalui jurnal bereputasi Q1 hingga Q3. Sitasi terbanyak diperoleh artikel yang berjudul Public islam and the problem of democratization, yang diterbitkan oleh jurnal Sociology of Religion A Quarterly Review. Secara co-authorship, penulis yang berasal dari negara Indonesia, paling banyak mendominasi, yaitu telah mempublikasikan sebanyak 47 dokumen, dengan total jaringan sejumlah 9. Analisis visualisasi network *co-occurrence* kata kunci penulis menunjukkan bahwa struktur pengetahuan dalam korpus publikasi bersifat multidisipliner dan terfragmentasi ke dalam tema-tema hukum, kebijakan publik, sosial, serta tata kelola. Publikasi terbaru (warna hijau–kuning, sekitar 2023–2026) memperlihatkan perluasan kajian ke isu criminal justice, konsumsi alkohol, sektor ekonomi, dan pariwisata, mencerminkan

respons penelitian terhadap tantangan sosial-ekonomi dan pembangunan kontemporer. Penelitian ke depan berpotensi menekankan analisis implementasi kebijakan di tingkat daerah, tata kelola kolaboratif antar aktor kolaborasi, serta dampak ketertiban umum terhadap pembangunan ekonomi dan perkotaan. Arah kebijakan ketertiban umum di Indonesia direkomendasikan untuk difokuskan pada penguatan kerangka *evidence-based policy* melalui integrasi data lintas sektor, peningkatan kapasitas pemerintah daerah dalam tata kelola kolaboratif, serta penyelarasan kebijakan ketertiban umum dengan agenda pembangunan ekonomi, pariwisata, dan keadilan sosial agar respons kebijakan dapat lebih adaptif.

DAFTAR PUSTAKA

- Affrian, R., Jumaidi, & Alfisyah. (2024). Implementasi Kebijakan Ketertiban Umum Dan Ketentraman Masyarakat Di Kabupaten Hulu Sungai Tengah (Studi Warung Remang-Remang Di Desa Sungai Buluh). *Jurnal Niara (Niaga & Negara)*, 16(3). <https://doi.org/https://doi.org/10.31849/niara.v16i3.18423>
- Anggoro, K. (2023). *Keamanan Nasional, Pertahanan Negara, Dan Ketertiban Umum*.
- Bagir, Z. A., Asfinawati, Suhadi, & Arianingtyas, R. (2020). Limitations to Freedom of Religion or Belief in Indonesia: Norms and Practices. *Religion and Human Rights*, 15. <https://doi.org/10.1163/18710328-BJA1000>
- Beazley, H. (2002). “Vagrants Wearing Make-up”: Negotiating Spaces on the Streets of Yogyakarta, Indonesia. *Urban Studies*, 39(9). <https://doi.org/https://doi.org/10.1080/00420980220151718>
- Butarbutar, J. M., & Yusuf, H. (2025). Penerapan Aturan Penertiban Pedagang Kaki Lima (PKL) di Trotoar Jakarta: Antara Ketertiban Umum dan Korban Sosial. *Media Hukum Indonesia (MHI)*, 3(3). <https://ojs.daarulhuda.or.id/index.php/MHI/article/view/2123>
- Donthu, N., Kumar, S., M., D., Pandey, N., & Lim, W. M. (2021). How to conduct a bibliometric analysis: An overview and guidelines. *Journal of Business Research*, 133(3).
- Evianny, E., & Sutiyo. (2023). *Perlindungan Masyarakat (Penyelenggaraan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Manajemen Kebencanaan)*. PT. Nas Media Indonesia.
- Fitri, A. (2019). Implementasi Peraturan Daerah No 3 Tahun 2009 Tentang Ketentraman Dan Ketertiban Umum Dalam Rangka Membangun Generasi Muda Sadar Budaya Di Nagari Kataping Kecamatan Batang Anai Kabupaten Padang Pariaman. *Jurnal EL-RIYASAH*, 10(1). <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.24014/jel.v10i1.7567>
- Hefner, R. W. (2001). Public Islam and the Problem of Democratization.

- Sociology of Religion, 62(4).
<https://doi.org/https://doi.org/10.2307/3712438>
- Idza, A. A. (2023). Gelandangan Dan Pengemis Dalam Konteks Ketenteraman Dan Ketertiban Umum Analisis Dampak Dan Solusi. *Jurnal Tatapamong*, 5(2).
<https://doi.org/https://doi.org/10.33701/jurnaltatapamong.v5i2.3859>
- Ilham, M., & Rahman, A. (2023). *Praktik Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum*. PT Pustaka Interes Media Amani.
- Indrayanto, A., Burgess, J., Dayaram, K., & Noermijati. (2014). A case study of transformational leadership and para-police performance in Indonesia. *Policing: An International Journal*, 37(2).
<https://doi.org/https://doi.org/10.1108/PIJPSM-03-2013-0029>
- Karyoto, & Pratama, L. Y. A. (2024). Langkah-Langkah Strategi Dalam Penanganan Ketertiban Umum Pada Kota Depok. *Bapenas Working Papers*, VII(2).
<https://doi.org/https://doi.org/10.47266/bwp.v7i2.330>
- Kristianto, T., & Farhana, F. (2024). Efektifitas Penegakan Perda No 8 Tahun 2007 Tentang Ketenteraman Ketertiban Umum Terhadap Pedagang Kaki Lima Di Cipete Selatan. *Jurnal Rectum: Tinjauan Yuridis Penanganan Tindak Pidana*, 6(3).
<https://doi.org/http://dx.doi.org/10.46930/jurnalrectum.v6i3.4726>
- Labolo, M. (2016). *Pengantar Pembinaan Ketenteraman dan Ketertiban Umum*.
- Literatur IPDN.
- PA, B., Ramadhan, M. C., & Amal, M. R. H. (2023). *Peran Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Penyelenggaraan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum Di Wilayah Kecamatan Medan Baru* [Universitas Medan Area].
<https://repositori.uma.ac.id/jspui/handle/123456789/20242>
- Rachmahwati, A., Martini, R., & Manar, D. G. (2024). Implementasi Perda Kota Tegal Nomor 9 Tahun 2018 Tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum Dan Ketenteraman Masyarakat (Studi Penertiban dan Penanganan Pengemis, Gelandangan, dan Orang Terlantar di Kota Tegal). *Journal of Politic and Government Studies*, 13(3).
<https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/jpgs/article/view/44523>
- Rahmadanita, A. (2019). pembinaan ketenteraman dan ketertiban umum: (Studi Kasus Gelandangan dan Pengemis). *Jurnal Tatapamong*, 95–104.
<https://doi.org/10.33701/jurnaltatapamong.v1i2.1154>
- Rahmadanita, A. (2023). Tren Penelitian Ketertiban Umum (Public Order): Sebuah Pendekatan Bibliometrik. *Jurnal Tatapamong*, 5(1).
<https://doi.org/https://doi.org/10.33701/jurnaltatapamong.v5i1.3656>
- Rochaetia, N., Prasetyo, M. H., Rozaha, U., & Park, J. (2023). A Restorative Justice System in Indonesia: A Close View from the Indigenous Peoples' Practices. *Sriwijaya Law Review*, 7(1).
<https://doi.org/10.28946/slrev.Vol7.I>

ss1.1919.pp87-104

Suprayetno, R. (2017). Kewenangan antara Satpol Pp dan Polri dalam Menciptakan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat. *Urnal Mahasiswa S2 Hukum Untan.* <https://www.neliti.com/publications/209949/kewenangan-antara-satpol-pp-dan-polri-dalam-menciptakan-ketertiban-umum-dan-kete>

Suradinata, E. (2013). *Etika Pemerintahan dan Geopolitik Indonesia*. Pustaka Ramadhan.

Verma, S., & Gustafsson, A. (2020). Investigating the emerging COVID-19 research trends in the field of business and management: A bibliometric analysis approach. *Journal of Business Research*, 118. <https://doi.org/https://doi.org/10.1016/j.jbusres.2020.06.057>

Zupic, I., & Čater, T. (2014). Bibliometric Methods in Management and Organization. *Organizational Research Methods*, 18(3). <https://doi.org/https://doi.org/10.1177/1094428114562629>